

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
SEBAGAI ALAT PENGAWASAN UNTUK MENILAI KINERJA  
KEUANGAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh**

**Nama : HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA**  
**NPM : 1405170303**  
**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : **HJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA**  
NPM : **1405170303**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI ALAT PENGAWASAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dinyatakan : **(B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Tim Penguji**

**Penguji I**

**(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)**

**Penguji II**

**(NURWANI, SE, M.Si)**

**Pembimbing**

**(Dra. FAHMAWARNI, MM)**

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**(HAJANURI, S.E., M.M., M.Si)**

**Sekretaris**

**(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA  
N.P.M : 1405170303  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI ALAT PENGAWASAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dra. FATMAWARNI, MM)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(P. PANURI, SE, MM, M.Si)

## Persembahkan

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dengan ini kupersembahkan skripsi ini untuk ayahanda dan ibunda tercinta yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan pengorbanan yang tak tergantikan sehingga aku selalu kuat dalam menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Ya Allah terimaakash engkau telah tempatkan aku diantara dua malaikatmu yang senantiasa ikhlas menjagaku, mendidik dan membimbingku dengan baik.

Kepada Kakak dan Abangku (Ali Marzuki Simamora, Febrina Anggraini Simamora, Dinul Fazry Simamora, Latifa Hannum Simamora dan Umar Siddiq Lubis) bro, sis Adek Siappudan kalian ini udah wisuda juga kan. Makasih untuk dukungan dan nasehat yang tiada henti dan makasih juga sudah ikutan heboh dikampung sana saat aku galau cari tempat riset yang tak kunjung dapat dan juga Semangat untuk kakakku Latifa Hannum Simamora yang lagi berjuang untuk profesi Ners nya semoga tahun ini lulus Ners ya ... Kebayangkan gimana bahagia ayah dan mama saat lihat foto kita pakai toga semua.

Kepada personil RAHMAN'S (Riska Fadilah Nasution, Aftika Diani, Mustika, Anisa Alfarisi Rambe, Nurhayati dan Sarmida Fitri) kalian teman seperjuangan, senasib dan sepenanggungan makasih untuk dukungan dan curhatan yang tiada hentinya dan makasih juga atas tawa dan solidaritas yang luarr biasa. Spesial doa untuk Riska Fadillah Nasution semoga proposal dan skripsi kamu cepat selesai tanpa ada halangan ya nang dan cepat wisudaaaa....Amin ya robbal'alamin.

Hanya skripsi ini yang dapat kupersembahkan untuk kalian semua  
Terimakasih ku ucapkan atas segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan dan maafkan juga atas segala kekhilafan dan kekuranganku.  
Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian semua...

By Hijrah Nopriyanti Simamora

## **ABSTRAK**

**HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA. NPM. 1405170303. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai Alat Pengawasan Untuk menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Sumatera Utara, 2018. Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai alat pengawasan untuk menilai kinerja keuangan dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan anggaran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan data dikumpulkan yaitu dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis varians untuk melihat selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan sebagai alat pengawasan untuk menilai kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih yang terjadi disebabkan oleh anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah yang menimbulkan ketidakefektifan dan efisiensi dalam penyusunan anggaran tetapi anggaran sudah digunakan sebagai alat pengawasan untuk menilai kinerja keuangan. Hal ini terlihat dari perbaikan realisasi anggaran pendapatan yang terus menerus meningkat setiap tahun dan juga faktor penyebab terjadinya kesenjangan anggaran adalah penekanan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber daya Mineral provinsi Sumatera Utara.

**Kata Kunci : Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah,Alat Pengawasan,Kinerja Keuangan,Analisis Varians**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “**Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai Alat Pengawasan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara** “ yang diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Sepanjang proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orangtua tercinta **Ayahanda Morhan Simamora** dan **Ibunda Rosmawar Dalimunthe** yang senantiasa mendidik dengan penuh sabar dan mencurahkan kasih sayang yang tiada hentinya dan selalu mendoakan penulis disetiap waktu.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak **Dr. Agussani M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Januri MM, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Ade Gunawan,SE, M.Si**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih SE, M.Si**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Dra. Fatmawarni MM**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis.
6. Ibu **Zulia Hannum SE, M.Si**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Saudara-saudara penulis, Febrina Anggraini Simamora, Dinul fazry Simamora, Latifa Hannum Simamora dan Umar Siddiq Lubis yang senantiasa memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis
8. Kepada Bapak Ir. Zubaidi M.Si, selaku Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk riset di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara .
9. Kepada Bapak Suprpto yang telah banyak membantu dalam pengambilan data pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
10. Kepada seluruh pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bimbingan pada masa perkuliahan.
12. Kepada Abangda Zulkifli Amahoru yang telah banyak membantu penulis dalam pencarian tempat riset.

13. Kepada Sahabat-sahabat Sarmida Fitri, Mustika, Riska Fadillah, Aftika Diani, Anisa Alfarisi Rambe, Nurhayati dan Mega Aulia yang selalu memberikan dukungan dan menemani hari-hari penulis.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Demikian penulis sampaikan dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Medan, JANUARI 2018

Penulis

**HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA**

**NPM: 1405170303**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teoritis .....	10
1. Anggaran .....	10
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	14
3. Laporan Realisasi Anggaran.....	16
4. Laporan Keuangan .....	16
5. Pengawasan .....	18
6. Kinerja Keuangan .....	19
7. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kerangka Berpikir.....	26

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	27
B. Defenisi Operasional Variabel .....	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisis Data .....	29

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	31
---------------------------	----

1. Gambaran Umum Dinas ESDM .....	31
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas ESDM .....	32
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kesenjangan Anggaran .....	39
<b>B. Pembahasan</b>	
1. Anggaran Pendapatan Daerah Dinas ESDM .....	39
2. Anggaran Belanja Daerah Dinas ESDM .....	41
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas ESDM .....	43
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kesenjangan anggaran .....	45

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel I-I. Tabulasi Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja .....	2
Tabel II-I. Hasil Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel III-1 Jadwal Penelitian .....	28
Tabel III-2 Kisi-Kisi Wawancara .....	29
Tabel IV-1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 .....	35
Tabel IV-2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 .....	36
Tabel IV-3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 .....	37
Tabel IV-4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 .....	38
Tabel IV-5 Tingkat Pencapaian Anggaran Pendapatan Daerah .....	39
Tabel IV-6 Tingkat Pencapaian Anggaran Belanja Daerah .....	40
Tabel IV-7 Selisih Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Kerangka Konseptual .....	26
---------------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>
Lampiran I	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	Pernyataan Skripsi
Lampiran III	Surat permohonan Judul Penelitian
Lampiran IV	Surat Pemohonan Izin Penelitian
Lampiran V	Berita Acara Bimbingan Proposal
Lampiran VI	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	Surat Izin Riset
Lampiran VIII	Surat Balasan Izin Riset
Lampiran IX	Berita Acara Seminar Jurusan Akuntansi
Lampiran X	Pengesahan Proposal
Lampiran XI	Surat Menyelesaikan Riset
Lampiran XII	Surat Penetapan Proyek Proposal dan Penghujukan Dosen Pembimbing
Lampiran XIII	Surat Telah menyelesaikan Riset Pada Dinas ESDM Provsu
Lampiran XIV	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013
Lampiran XV	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014
Lampiran XVI	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015
Lampiran XVII	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016
Lampiran XVIII	Hasil Wawancara Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Nordiawan, dkk (2009, hal. 159) menyatakan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kegiatan operasional suatu entitas selama periode tertentu. Salah satu komponen dalam laporan keuangan menurut PP 24 Tahun 2005 adalah laporan realisasi anggaran. Dalam laporan ini akan terlihat pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitas serta biaya dalam rangka perolehan pendapatan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasinya merupakan kinerja suatu perusahaan, jika terjadi perbedaan tersebut memungkinkan yang dapat terjadi adalah bertambahnya biaya atau berkurangnya pendapatan dari yang telah dianggarkan sebelumnya, atau sebaliknya berkurangnya biaya dan bertambahnya pendapatan dari yang direncanakan pemerintah sebagaimana yang dikatakan oleh Anthony dan Govindarajan dalam Muhammad Irfan et al (2016) kesenjangan anggaran (*budget slack*) adalah perbedaan antara jumlah anggaran dan jumlah estimasi terbaik. Menurut Muhammad Irfan et al (2016) secara praktis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan anggaran adalah asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional sedangkan secara

teoritis faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran adalah partisipasi anggaran yang tinggi.

Menurut Nursoimah dan Dorijati (2017) semakin besar tingkat rasio efektifitas pendapatan daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Sedangkan pada anggaran belanja pemerintah daerah kriteria tingkat efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 dalam Untari Rusita (2014) adalah:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80-90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian antara 60% , maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Berikut adalah gambaran kondisi dari pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari laporan realisasi anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel I-1 Tabulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Nama Akun	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tingkat efisiensi
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan-LRA	4.000.000	4.000.000	100	5.000.000	6.000.000	120	36.400.000	69.400.000	190,66	120.000.000	139.000.000	115,83	Efisien (Favorable)
Pendapatan Asli Daerah	4.000.000	4.000.000	100	5.000.000	6.000.000	120	36.400.000	69.400.000	190,66	120.000.000	139.000.000	115,83	Efisien (Favorable)
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	4.000.000	4.000.000	100	5.000.000	6.000.000	120	36.400.000	69.400.000	190,66	120.000.000	139.000.000	115,83	Efisien (Favorable)
Pendapatan retribusi Jasa Umum	-	-	-	5.000.000	6.000.000	120	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya cetak	-	-	-	5.000.000	6.000.000	120	-	-	-	-	-	-	-

peta														
Belanja	16.652.6 28.904	13.727.6 47	82 ,4 4	23.949.1 55.220	21.8877. 041.294	91 ,3 4	27.048.1 75.000	25.321.8 76.403	93, 62	24.508.0 16.150	23.035.9 94.738	93, 99	Tidak Efisien (Unfav orable)	
Belanja Operasi	15.403.8 88.904	12.479.9 37.080	81 ,0 2	21.802.7 75.400	19.946.5 36.294	88 ,5 5	26.329.7 75.000	24.611.5 49.403	93, 47	24.032.2 01.150	22.570.9 51.738	93, 92	Tidak Efisien (Unfav orable)	
Belanja Modal	1.248.74 0.000	1.247.71 0.000	99 ,9 2	2.146.37 9.820	1.940.50 5.000	90 ,4 0	718.400. 000	710.327. 000	98, 88	475.815. 000	465.043. 000	97, 74	Tidak Efisien (Unfav orable)	
Surplus/ (Defisit)	(16.648.6 28.904)	(13.727. 647.080)	82 ,4 4	(23.949. 155.220)	(21.871. 041.294)	92 ,3 4	(27.011. 775.000)	(25.252. 476.403)	93, 62	(24.388. 016.150)	(22.896. 994.738)	93, 99	Tidak Efisien (Unfav orable)	
SILPA	(16.648.6 28.904))	(13.727. 647.080)	82 ,4 4	(23.949. 155.220)	(21.871. 041.294)	92 ,3 4	(27.011. 775.000)	(25.252. 476.403)	93, 62	(24.388. 016.150)	(22.896. 994.738)	93, 99	Tidak Efisien (Unfav orable)	

Berdasarkan data pada tabel I-1 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi dari tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami fluktuatif atau mengalami kenaikan juga penurunan. Dari data pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara ini juga terlihat bahwa terdapat kesenjangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah dimana anggaran pendapatan lebih rendah daripada anggaran belanja daerah karena anggaran pendapatan yang diperoleh pada setiap tahunnya meningkat akan tetapi juga diikuti oleh peningkatan anggaran belanja daerah yang mengakibatkan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara mengalami defisit anggaran. Berdasarkan fenomena pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bisa dilihat bahwa tingkat pencapaian realisasi anggaran pendapatan daerah sebesar 115,835 maka berdasarkan teori yang dikemukakan Nursoimah dan Dorijati (2017) dapat dikatakan anggaran pendapatan daerah sudah efektif namun jika dilihat dari segi anggaran belanja daerah dapat dilihat kinerja belanja daerah dari tingkat pencapaian realisasi berkisar 93-97% maka berdasarkan teori Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 dalam Untari Rusita (2014) dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran belanja daerah pada dinas tersebut kurang efisien.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan akan lebih kecil daripada anggaran belanja daerah (Nurlan Darise, 2009, hal. 32).

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran lalu, pengurangan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Menurut Deputi pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah dalam Untari Rusita (2014) mengatakan bahwa penyerapan dana tidak efektif tercermin dalam sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Nordiawan (2009, hal. 146) mengatakan bahwa akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Dalam peraktiknya anggaran sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penyusunan dan alokasi anggaran sering mengabaikan prinsip keadilan sosial. Hal itu ditandai oleh alokasi anggaran pegawai lebih besar dari anggaran untuk kepentingan publik. Disinilah terlihat mengapa pengawasan anggaran perlu dilakukan agar anggaran benar-benar ditempatkan sebagaimana fungsi yang seharusnya.

Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada setiap tahunnya yaitu pada tahun 2013 sebesar 13.723.647.080, pada tahun 2014 sebesar 21.871.041.294, pada tahun 2015 sebesar 25.252.467.403 dan pada tahun 2016 sebesar 22.896.994.738. Jumlah SILPA yang besar tersebut terjadi karena semata-mata efisiensi pengelolaan keuangan daerah belum efektif di dalamnya dan juga kurangnya pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2013 sampai dengan 2016 mengalami fluktuatif.
2. Adanya kesenjangan dan ketidakseimbangan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2016 yang tidak menguntungkan (*unfavorable variance*).
3. Kurangnya pengawasan terhadap penyusunan anggaran.
4. Besarnya dana SILPA yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyebabkan kinerja belanja tidak efisien.

### **C. Rumusan Masalah**

#### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai alat pengawasan untuk menilai kinerja keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara?
- b. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara?



## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis anggaran sebagai alat pengawasan untuk menilai kinerja keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dipergunakan untuk:

- a. Bagi Peneliti  
Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti dalam meraih gelar Sarjana dan sebagai bahan pembuktian teori bagi penulis yang diperoleh dari bangku perkuliahan.
- b. Bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara  
Bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara penelitian ini dapat memberikan informasi tentang anggaran sebagai alat pengawasan laporan keuangan sehingga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan pengawasan terhadap anggaran dan dapat memberikan masukan untuk melakukan

penyesuaian ataupun perbaikan dalam meningkatkan pengawasan untuk menilai kinerja manajemen.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan data dasar bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan anggaran sebagai alat pengawasan laporan keuangan dan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Anggaran**

Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan,dkk (2009, hal. 19) Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Sedangkan,Nordiawan,dkk (2009, hal.19) menyatakan Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang (Julita,dkk, 2014, hal. 7). Anggaran diperlukan karena ada tujuan dan manfaatnya. Dimana tujuan dan manfaat daripada anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Tujuan Anggaran**

Ada beberapa tujuan daripada anggaran, antara lain:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis.

4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

b. Manfaat dan kelemahan anggaran

Anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain:

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
3. Dapat memotivasi pegawai.
4. Menimbulkan rasa tanggungjawab pada pegawai.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
7. Alat pendidikan bagi para manager.

Kelemahan dari anggaran antara lain:

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat.

3. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menggerutu dan menentang sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif.

Anggaran juga mempunyai 3 fungsi yaitu:

a. Fungsi perencanaan

1. Mendasarkan tindakan pada penyelidikan, studi dan riset.
2. Mengumpulkan bantuan, pendapat, saran dan berbagai pihak dalam perusahaan dalam menentukan cara yang paling menguntungkan untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Sebagai sarana yaitu kebijakan pokok secara berkala ditelaah kembali, disusun dan ditetapkan sebagai pedoman pokok organisasi secara keseluruhan.
4. Membantu menentikan tujuan perusahaan.
5. Membantu menstabilisasi kesempatan kerja dalam perusahaan.
6. Membantu membuat lebih efektif penggunaan peralatan (equipment).
7. Anggaran merupakan panduan dalam pencapaian sasaran ekonomis perusahaan.
8. Implikasi keuangan pada masa yang akan datang serta konsekuensi dan tindakan yang diperlukan akan lebih baik.
9. Rencana kerja dapat dianalisis dengan lebih baik.
10. Perencanaan partisipatif akan menghasilkan komitmen pelaksana.

b. Fungsi Pengkoordinasian

1. Mengkoordinasi dan menyatukan kegiatan manusia dalam perusahaan.

2. Mengaitkan kegiatan-kegiatan perusahaan dengan kecenderungan umum perkembangan usaha yang diharapkan di kemudia hari.
  3. Mengarahkan dana dan daya pada usaha yang paling menguntungkan melalui program yang berimbang (antara fungsi-fungsi/unit kegiatan dalam perusahaan) dan menyatu.
  4. Menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam organisasi.
  5. Karena penyusunan anggaran yang lebih baik melibatkan segenap fungsi di perusahaan maka koordinasi dalam perencanaan akan terjadi.
  6. Dalam tahap realisasi, anggaran akan cenderung mendorong adanya tindakan koordinatif.
  7. Setelah diterapkan, perbandingan antara realisasi dengan rencana perlu dibahas secara terkoordinasi.
- c. Fungsi Pengendalian/pengawasan
1. Mengendalikan operasi dan biaya serta pengeluaran.
  2. Mencegah terjadinya pemborosan.
  3. Memberikan standar yang memadai untuk mengukur prestasi.
  4. Anggaran merupakan alat pembanding seberapa jauh pelaksanaan tercapai.
  5. Mendorong pelaksanaan pengendalian biaya.

Menurut Rambe,dkk. (2015, hal. 21) Anggaran merupakan jumlah-jumlah yang direncanakan dan harus dicapai dimasa yang akan datang. Budget-budget itu disamping berfungsi sebagai suatu rencana dapat pula dipergunakan sebagai alat pengawasan (*control*), dalam arti bahwa budget tersebut ditetapkan sebagai



standar dengan diperbandingkan dengan hasil-hasil senyatanya yang benar-benar dicapai, sehingga dapat ditelaah apa benar-benar adanya kegagalan maupun sebab-sebab kesuksesan usaha-usaha itu.

Menurut Muhammad Irfan et al (2016) secara praktis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan anggaran adalah asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional sedangkan secara teoritis faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran adalah partisipasi anggaran yang tinggi.

## **2. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Darise, 2009, hal. 32)

Menurut Nordiawan,dkk (2009, hal. 39) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi antara lain:

1. Fungsi Otorisasi yaitu mengandung arti bahwa peraturan perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah.

Pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan mencakup dana bag hasil (pajak dan sumber daya alam), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang dan/ atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau penda lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung  
Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Belanja langsung  
Yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

### **3. Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan kekuatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi anggaran meyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Unsur-unsur laporan Realisasi Anggaran antara lain:

1. Pendapatan-LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit-LRA
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

### **4. Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh satu entitas pelaporan. Sedangkan, Nordiawan (2009, hal. 151) menyatakan Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh satu entitas.

Menurut Rambe,dkk (2015, hal. 39) Laporan Keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar

pamakai. Sedangkan menurut Astuty (2014, hal. 7) Laporan Keuangan merupakan satu-satunya media komunikasi antara pihak luar dengan manajemen, karena itu laporan keuangan dari akuntansi keuangan memerlukan suatu standarnisasi bentuk laporan keuangan dari agar pengguna laporan keuangan dari pihak luar dapat membandingkan berbagai laporan keuangan dari beberapa perusahaan yang berbeda sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Tujuan laporan keuangan menurut IAI (2012) adalah:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian di masa lalu (historis) dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
3. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
2. Undang-Undang di bidang keuangan negara.
3. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur tentang keuangan daerah.
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

## 5. Pengawasan

Pengawasan (*Controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. (Handoko, 2003, hal. 25)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai Handoko (2003, hal.359). Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan dengan efektif. Sedangkan, Menurut Astuty (2014, hal. 111) Salah satu pelaksanaan pengawasan yang baik bagi manajemen adalah membandingkan hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan apa yang seharusnya terjadi.

Menurut Julita,dkk (2014, hal. 4) langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengawasan adalah

- a. Penyusunan tujuan
- b. Penetapan Standar
- c. Pengukuran hasil kerja
- d. Perbandingan fakta dengan standar
- e. Tindakan Koreksi.

Untuk melihat kaitan antara anggaran dan pengawasan maka ada tahapan dalam poses pengawasan yaitu:

1. Menyusun standar
2. Menilai prestasi
3. Membandingkan prestasi dengan standar
4. Menilai dan menyesuaikan dengan situasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akuntansi memiliki komponen pengawasan dalam sistem akuntansi itu sendiri. Pemerintah akan selalu berhati-

hati karena ia sadar bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang dilakukannya tidak bisa lepas dari siklus akuntansi, direkam, dicatat dan akhirnya akan tergambar dalam laporan keuangan yang akan dibaca oleh pihak yang berkepentingan nantinya. Dengan demikian secara sadar akuntansi dan penganggaran melakukan fungsi pengawasan.

## **6. Kinerja Keuangan**

Menurut Mahsun (2005, hal. 25) dalam Marchelino Daling (2013) Kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi individu maupun kelompok. Mahsun (2005, hal. 5) juga mengatakan bahwa evaluasi kinerja adalah kegiatan dan fungsi yang diamanahkan kepadanya sebagaimana visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik itu digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik, Mahmudi (2012, hal. 12) dalam Marchelino Daling (2013).

## 7. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan anggaran sebagai alat pengawasan laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-I. Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Afif Fuadi (2013)	Pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.	Metode Deskriptif	Pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD di Kota Bukittinggi dan pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD di Kota Bukittinggi.
2	Simson Verimon, et al (2017)	Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).	Metode Kualitatif	Hasil penelitian antara lain: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).</li><li>2. Hasil analisis regresi terhadap hipotesis kedua dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD.</li><li>3. Berdasarkan hasil uji hipotesis ke tiga dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.</li><li>4. Berdasarkan hasil uji hipotesis ke empat dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat</li></ol>

				dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.
3	Bambang Pamungkas (2012)	Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Metode Kausalitas	<p>Hasil Penelitian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun simultan. Hal ini berarti bahwa baik secara parsial maupun simultan bilamana kualitas peraturan perundang-undangan yang tercermin dari penerapan asas formalitas dan asas materialitas diterapkan: akuntansi keuangan sektor publik dapat diimplikasikan dan elemen-elemen pengawasan yang meliputi antara lain standar hasil yang ingin dicapai, laporan, anggaran dan <i>auditing</i> dilaksanakan maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.</li> <li>2. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan. Hal ini mengandung makna bahwa baik secara parsial maupun secara simultan bilamana peraturan perundang-undangan yang berkualitas diterapkan semakin baiknya kualitas laporan keuangan pemerintah dan diterapkannya pengawasan secara memadai maka akan meningkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> </ol>
4	Isma Coryanat	Akuntabilitas, Partisipasi	Metode Deskriptif	<p>Hasil penelitian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari hasil pengujian regresi</li> </ol>



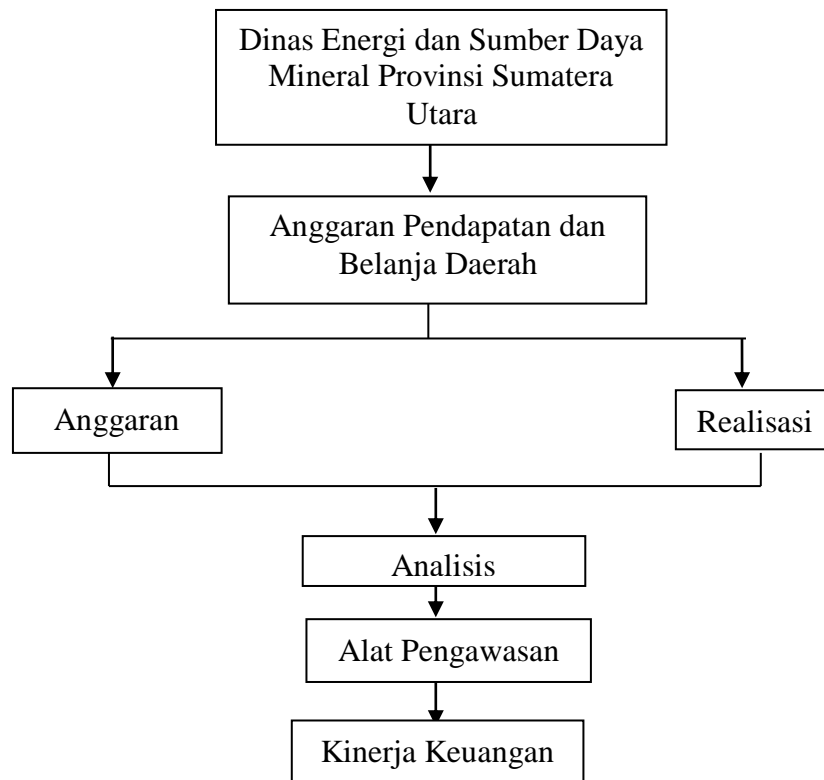
	a (2011)	Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).		<p>sederhana diatas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan publik pada anggota dewan DPRD di Kota Bengkulu menunjukkan hubungan yang sangat signifikan dengan tingkat signifikan 0,000. Ini menunjukkan bahwa anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan terhadap keuangan daerah nantinya.</p> <p>2. Selain pengujian dilakukan dengan regresi sederhana, peneliti juga menggunakan regresi berganda untuk melihat bagaimana pengetahuan dewan terhadap anggaran jika dipengaruhi dengan adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel yang peneliti turunkan yaitu partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik serta akuntabilitas, yang disebut dengan variabel moderating, semuanya ikut mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan publik secara signifikan dengan tingkat signifikan 0,000</p> <p>3. Semua hipotesa yang peneliti ajukan, semuanya diterima dengan tingkat signifikan 0,000.</p>
5	Grace Yunita	Analisis Kinerja	Metode Deskriptif	1. Berdasarkan analisis variansi belanja pada laporan realisasi

	<p>Liando dan Inggriani Elim (2016)</p>	<p>Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe.</p>		<p>anggaran untuk tahun anggaran 2011-2014 menunjukkan bahwa kinerja belanja pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pertumbuhan belanja pada pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai terlihat pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 dibandingkan dengan tahun anggaran 2011 dan 2012.</li> <li>3. Analisis keserasian untuk belanja operasi terhadap total belanja daerah dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2014 menunjukkan total belanja yang meningkat pesat namun total belanja operasi tidak meningkat secara signifikan sehingga rasio belanja langsung mengalami penurunan dibanding tahun 2012 dan 2013 yang dinilai stabil.</li> <li>4. Analisis keserasian untuk belanja modal daerah dari tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan mulai tahun 2013 berbanding terbalik dengan belanja modal pada tahun 2012 yang menurun dari tahun 2011.</li> <li>5. Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan sangihe dapat melakukan pengheatan anggaran yang terlihat stabil. Peningkatan pertumbuhan belanja ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dan juga dipengaruhi oleh besarnya</li> </ol>
--	---	---	--	--

				<p>inflasi.</p> <p>6. Analisis keserasian secara keseluruhan menggambarkan bahwa Pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe sebagian besar membelanjakan anggaranya untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal.</p>
--	--	--	--	---

## B. Kerangka Berpikir

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Anggaran juga berfungsi sebagai suatu rencana dapat pula dipergunakan sebagai alat pengawasan (*control*), dalam arti bahwa budget tersebut ditetapkan sebagai standar dengan diperbandingkan dengan hasil-hasil senyatanya yang benar-benar dicapai, sehingga dapat ditelaah apa benar-benar adanya kegagalan maupun sebab-sebab kesuksesan usaha-usaha itu. Dengan adanya pengawasan kita dapat menilai kinerja keuangan berdasarkan anggaran pendapatan dan biaya. Kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.



**Gambar II-I Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data, merumuskan, mengklasifikasi serta menginterpretasikan sehingga memberikan gambaran atau keterangan yang jelas mengenai masalah yang dihadapi. Penelitian ini juga bersifat kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dengan angka-angka.

#### **B. Defenisi operasional variabel**

C.

Variabel dalam penelitian ini adalah anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang. Anggaran akan diukur dengan target (anggaran) dan Realisasi dengan cara menghitung selisih antara anggaran dan realisasi pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.



## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang tersedia berupa catatan atau dokumen-dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
2. Teknik Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data baik itu dengan dialog (tanya jawab) secara lisan maupun tulisan.

Adapun kisi-kisi wawancara yang dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

**Tabel III-2**  
**Kisi-kisi wawancara**

No	Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesenjangan anggaran	Butir Pertanyaan
1.	Asimetri Informasi	Pertanyaan 1 s/d 5
2.	Penekanan Anggaran	Pertanyaan 6 s/d 8
3.	Komitmen Organisasi	Pertanyaan 9 s/d 13
4.	Partisipasi Anggaran	Pertanyaan 14 s/d 15

## F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian. Dimana analisis yang digubakan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini berupa laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
2. Menganalisis anggaran pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan pendapatan yang telah dianggarkan. Pendapatan daerah mencerminkan seberapa besar pemasukan pemerintah untuk membiayai belanja pemerintah.
3. Menganalisis anggaran belanja daerah, yaitu dengan menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian untuk membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencana belanja yang kemudian disusun dan diawasi melalui proses penyusunan anggaran.
4. Menganalisis realisasi Pendapatan dan belanja daerah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah sehingga dapat memberikan informasi bagi manajemen untuk mengawasi penyimpangan yang terjadi dari rencana kegiatan yang dapat digunakan untuk dasar menilai kinerja manajemen.
5. Menyimpulkan hasil analisis.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara**

Laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara selama satu periode pelaporan. Secara umum laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan untuk membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang pada dasarnya digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, penatausahaan perbendaharaan,

penatausahaan kas daerah dan akuntansi pengelolaan keuangan secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik.

Pelaporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah.

## **2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pendapatan daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah semua pengeluaran kas atau setara kas untuk membayar beban operasional kantor atau membayar biaya program/kegiatan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Semua kas untuk membiayai seluruh beban diterima dari bendahara umum

daerah melalui rekening Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara di Bank Sumut yang ditetapkan oleh Gubernur.

Adapun anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

**a. Anggaran Pendapatan daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Utara**

Adapun Anggaran Pendapatan daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bersumber dari Pendapatan Asli daerah yang mana pendapatan asli daerah yang diperoleh dari :

1. Hasil retribusi daerah yaitu Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yaitu Penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**b. Anggaran Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Sumatera Utara**

Adapun Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral terdiri dari :

1. Belanja Operasi yang terdiri dari
  - a. Belanja pegawai yaitu seluruh belanja gaji dan tunjangan pegawai serta tambahan penghasilan pegawai selama tahun berjalan.
  - b. Belanja barang dan jasa yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa.
2. Belanja Modal yang terdiri dari
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin.
  - b. Belanja modal aset tetap lainnya yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset.

Adapun anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV-1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber**  
**Daya Mineral provinsi Sumatera Utara Tahun 2013**

Uraian	Tahun 2013		Varian
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan-LRA	4.000.000	4.000.000	0
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	4.000.000	4.000.000	0
Pendapatan Retribusi Daerah	4.000.000	4.000.000	0
Belanja	16.652.628.904	13.727.647.080	2.924.981.824
Belanja Operasi	15.403.888.904	12.479.937.080	2.923.951.824
Belanja Pegawai	11.669.698.254	8.796.039.930	2.873.658.324
Belanja Barang dan Jasa	3.734.190.650	3.683.897.150	50.293.500
Belanja Modal	1.248.740.000	1.247.710.000	1.030.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.250.000	50.550.000	700.000
Belanja Modal Aset tetap lainnya	1.197.490.000	1.197.160.000	330.000

*Sumber: Data diolah peneliti, 2018*

Dari tabel IV-1 dapat terlihat pada tahun 2013 bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara stabil yaitu realisasi yang dihasilkan oleh dinas tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sehingga tidak memiliki varian sedangkan anggaran belanja daerah pada tahun 2013 realisasi lebih rendah daripada anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran belanja daerah memiliki varian yang menguntungkan yaitu sebesar 2.924.981.824. Akan tetapi anggaran pendapatan daerah lebih rendah daripada anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak

dapat menutupi pengeluaran sehingga terjadinya pemborosan anggaran pada dinas tersebut.

**Tabel IV-2**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Utara Tahun 2014**

Uraian	Tahun 2014		Varian
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan-LRA	5.000.000	6.000.000	1.000.000
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	5.000.000	6.000.000	1.000.000
Pendapatan Retribusi Daerah	5.000.000	6.000.000	1.000.000
Belanja	23.949.155.220	21.877.041.294	2.072.113.926
Belanja Operasi	21.802.775.400	19.946.536.294	1.856.239.106
Belanja Pegawai	10.496.257.000	9.234.677.444	1.261.579.556
Belanja Barang dan Jasa	11.306.518.400	10.701.858.850	604.659.550
Belanja Modal	2.146.379.820	1.940.505.000	205.874.820
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.500.000	59.290.000	210.000
Belanja Modal Aset tetap lainnya	2.086.879.820	1.881.215.000	205.664.820

*Sumber: Data diolah peneliti, 2018*

Dari Tabel IV-2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 realisasi anggaran pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran pendapatan daerah memiliki varian yang menguntungkan yaitu sebesar 1.000.000 sedangkan realisasi anggaran belanja daerah lebih rendah daripada anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran belanja daerah juga memiliki varian yaitu sebesar 2.072.113.926. Akan tetapi anggaran pendapatan daerah lebih rendah daripada anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak dapat menutupi pengeluaran sehingga terjadinya pemborosan anggaran pada dinas tersebut.

**Tabel IV-3**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber**  
**Daya Mineral provinsi Sumatera Utara Tahun 2015**

Uraian	Tahun 2015		Varian
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan-LRA	36.000.000	69.400.000	33.400.000
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	36.000.000	69.400.000	33.400.000
Pendapatan Retribusi Daerah	36.000.000	69.400.000	33.400.000
Belanja	27.048.175.000	25.321.876.403	1.726.298.597
Belanja Operasi	26.329.775.000	24.611.549.403	1.718.225.597
Belanja Pegawai	9.372.860.000	8.721.807.933	651.052.067
Belanja Barang dan Jasa	16.956.915.000	15.889.741.470	1.067.173.530
Belanja Modal	718.400.000	710.327.000	8.073.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	703.400.000	695.387.000	8.013.000
Belanja Modal Aset tetap lainnya	15.000.000	14.940.000	60.000

*Sumber: Data diolah peneliti, 2018*

Dari Tabel IV-3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 realisasi anggaran pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran pendapatan daerah memiliki varian sebesar 33.400.000 sedangkan realisasi anggaran belanja daerah lebih rendah daripada anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran belanja daerah juga memiliki varian yaitu sebesar 1.726.298.597. Akan tetapi anggaran pendapatan daerah lebih rendah daripada anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak dapat menutupi pengeluaran sehingga terjadinya pemborosan anggaran pada dinas tersebut.

**Tabel IV-4**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber  
Daya Mineral provinsi Sumatera Utara Tahun 2016**

Uraian	Tahun 2016		Varian
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan-LRA	120.000.000	139.400.000	19.400.000
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	120.000.000	139.400.000	19.400.000
Pendapatan Retribusi Daerah	120.000.000	139.400.000	19.400.000
Belanja	24.508.016.000	23.035.994.738	1.472.021.262
Belanja Operasi	24.032.201.150	22.570.951.738	1.461.249.412
Belanja Pegawai	11.018.437.000	9.715.506.138	1.302.930.862
Belanja Barang dan Jasa	13.013.764.150	12.855.445.600	158.318.550
Belanja Modal	475.815.000	465.043.000	10.772.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.815.000	440.490.000	10.325.000
Belanja Modal Aset tetap lainnya	25.000.000	24.553.000	447.000

*Sumber: Data diolah peneliti, 2018*

Dari Tabel IV-4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 realisasi anggaran pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran pendapatan daerah memiliki varian sebesar 19.400.000 sedangkan realisasi anggaran belanja daerah lebih rendah daripada anggaran yang telah ditetapkan sehingga anggaran belanja daerah juga memiliki varian yaitu sebesar 1.472.021.262. Akan tetapi anggaran pendapatan daerah lebih rendah daripada anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak dapat menutupi pengeluaran sehingga terjadinya pemborosan anggaran pada dinas tersebut.



Maka dari itu berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara jika ditinjau dari tingkat pencapaiannya.

**Tabel IV-5**  
**Tingkat pencapaian Anggaran Pendapatan Daerah**  
**Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Pencapaian	keterangan
2013	4.000.000	4.000.000	100%	Efektif
2014	5.000.000	6.000.000	120%	Efektif
2015	36.400.000	69.400.000	190,6%	Efektif
2016	120.000.000	139.000.000	115,8%	Efektif

*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara*

Dari Tabel IV-5 dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki tingkat efektifitas diatas 100% pada tahun 2014 sampai dengan 2016 dan pencapaian realisasi pendapatan yang diperoleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada setiap tahunnya yang mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2013 sebesar 100%, pada tahun 2014 sebesar 120%, pada tahun 2015 sebesar 190,6% dan pada tahun 2016 sebesar 115,8% maka anggaran pendapatan daerah sudah dapat dikatakan efektif dalam menyusun anggaran seperti yang disebutkan oleh Nursoimah dan Dorijati (2017) semakin besar tingkat rasio efektifitas pendapatan daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

**Tabel IV-6**  
**Tingkat Pencapaian Anggaran Belanja Daerah**  
**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Belanja Operasi		%	Ket	Belanja Modal		%	Ket
	Anggaran	realisasi			Anggaran	Realisasi		
2013	15.403.888.904	12.479.937.080	81,02	Cukup Efisien	1.248.740.000	1.247.710.000	99,2	Tidak Efisien
2014	21.802.775.400	19.946.536.294	88,55	Cukup Efisien	2.146.379.820	1.940.505.000	90,40	Tidak Efisien
2015	26.329.775.000	24.611.549.403	93,47	Tidak Efisien	718.400.000	710.327.000	98,88	Tidak Efisien
2016	24.032.201.150	22.570.951.738	93,92	Tidak Efisien	475.815.000	465.043.000	97,74	Tidak Efisien

*Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara*

Dari Tabel IV-6 dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian anggaran belanja daerah rata-rata tidak efisien karena tingkat pencapaian belanja daerah melebihi presentasi kriteria tingkat pencapaian seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 dalam Untari Rusita (2014) Jika hasil pencapaian antara 80-90% maka dikatakan cukup efisien sedangkan jika hasil pencapaian antara 90-100% dikatakan kurang efisien. Adapun anggaran belanja yang tingkat pencapaiannya cukup efisien yaitu belanja operasi pada tahun 2013 sebesar 82,44%, dan belanja operasi pada tahun 2014 sebesar 88,55% sedangkan anggaran belanja yang tingkat pencapaiannya tidak efisien yaitu belanja operasi pada tahun 2015 yaitu sebesar 93,47%, belanja operasi pada tahun 2016 sebesar 93,92%, belanja modal pada tahun 2013 sebesar 99,92%, belanja modal pada tahun 2014 sebesar 90,40%, belanja modal pada tahun 2015 sebesar 99,88% dan belanja modal pada tahun 2016 97,74%. Demikian anggaran operasi pada tahun 2013 dan 2014 masih dikatakan cukup efisien dalam menyusun anggaran sedangkan anggaran operasi pada tahun 2015

dan 2016 serta anggaran modal pada setiap tahunnya dikatakan tidak efisien dalam menyusun anggaran.

Sesuai dengan tingkat pencapaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang tidak efisien pada anggaran belanja daerah maka dapat dilihat varian antara anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

**Tabel IV-7**  
**Selisih antara anggaran Pendapatan dan belanja Daerah**  
**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Pendapatan	Belanja	Selisih	%	Keterangan
2013	4.000.000	13.727.647.080	(13.723.647.080)	-343%	Defisit
2014	6.000.000	21.877.041.294	(21.871.041.294)	-364,5%	Defisit
2015	69.400.000	25.321.876.403	(25.041.476.403)	-36,1%	Defisit
2016	139.000.000	23.035.994.738	(22.896.994.738)	-16,5%	Defisit

*Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018*

Berdasarkan Tabel IV-7 dapat dilihat bahwa varian anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu pada tahun 2013 varian sebesar 343%, pada tahun 2014 sebesar 364,5% akan tetapi pada tahun 2015 dan 2016 varian anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 36,1 % dan pada tahun 2016 sebesar 16,5 % akan tetapi meskipun varian anggaran mengalami penurunan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahunnya tetap mengalami defisit anggaran. Hal ini dikarenakan pengeluaran pada belanja daerah lebih besar daripada pemasukan pada pendapatan daerah sehingga menyebabkan anggaran tersebut mengalami

defisit. Pendapatan yang rendah tersebut mencerminkan bahwa pemasukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak dapat untuk membiayai belanja pada dinas tersebut.

### **3. Faktor- Faktor penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil penelitian terjadi varian antara anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Utara. Adapun hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara antara lain:

Berdasarkan faktor Asimetri Informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Utara melakukan proses fasilitasi Musrenbang dalam bentuk bimbingan dan proses perencanaan kegiatan juga dilakukan bersamaan dengan proses penganggaran serta sudah melakukan perbaikan kualitas anggaran yang dievaluasi oleh tim TAPD dan tidak ada perbedaan informasi yang dimiliki antara atasan dan bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa Asimetri Informasi bukan merupakan faktor penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan faktor Penekanan Anggaran yaitu adanya desakan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk melaksanakan anggaran-anggaran tertentu yang telah disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penekanan anggaran yang dilakukan yaitu dengan memprioritaskan anggaran-anggaran tertentu untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa penekanan anggaran yang dilakukan merupakan faktor terjadinya kesenjangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara merupakan.

Berdasarkan faktor Komitmen Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera utara melakukan komitmen organisasi yang dinamakan dengan kontrak kinerja dan dalam penyusunan anggaran juga Dinas tersebut melakukan inovasi dengan studi banding ke daerah lain dan melihat peraturan baru dalam penyusunan anggaran agar memastikan bahwa anggaran akan tetap terpadu, konsisten dan sinkron antara perencanaan dan penganggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah baik sehingga Komitmen Organisasi bukan merupakan faktor terjadinya kesenjangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan faktor Partisipasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atasan sudah berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dengan memberika pendapat dan bertanggungjawab dalam penyusunan anggaran serta meminta pendapat pegawai dari setiap bidang untuk penyusunan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran bukan merupakan faktor

penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai Alat Pengawasan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.**

Kesenjangan dan ketidakseimbangan anggaran pendapatan dan belanja daerah disebabkan oleh ketidakefisienan anggaran belanja daerah yang mana anggaran belanja daerah selalu lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah yang menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami defisit anggaran. Artinya pada proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah belum diawasi dengan baik. Defisit anggaran yang terjadi pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral juga mengakibatkan SILPA yang diperoleh pada dinas tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 yaitu pada tahun 2013 SILPA yang diperoleh sebesar Rp.13.723.647.080, pada tahun 2014 SILPA yang diperoleh sebesar Rp.21.871.041.294 dan pada tahun 2015 sebesar Rp.25.252.467.403 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu SILPA yang diperoleh Rp.22.896.994.738. Hal ini mengakibatkan penyerapan dana dan kinerja keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral belum efektif sebagaimana yang dikatakan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaran

Keuangan dalam Untari Rusita (2014) mengatakan bahwa penyerapan dana tidak efektif tercermin dalam sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

Dari hasil analisis maka terlihat secara keseluruhan bahwa hampir semua aktivitas pendapatan dan belanja telah digunakan sebagai alat pengawasan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini terlihat dari perbaikan realisasi anggaran pendapatan yang terus-menerus meningkat pada setiap tahunnya dan dengan perbaikan belanja daerah tersebut maka anggaran untuk belanja daerah juga menurun pada tahun 2016 dan juga Perbaikan anggaran ini juga dapat dilihat dari varian anggaran yang menurun pada tahun 2015 dan tahun 2016 sehingga perolehan SILPA juga menurun pada tahun 2016..

Dari analisa diatas menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebenarnya telah melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah. Namun demikian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara juga harus melakukan analisis varian untuk mengetahui besarnya selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Hal inilah yang menjadi tanggungjawab oleh pimpinan untuk meningkatkan pengawasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar tidak terjadi kesenjangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah yang terlalu jauh. Meskipun sifat anggaran yang hanya berupa estimasi atau perkiraan tetapi hendaknya dalam penyusunan anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara dilakukan pengawasan yang lebih teliti mengingat bahwa anggaran juga mampu menjadi alat pengawasan untuk

penyusunan laporan keuangan pada tahun berikutnya dan dari anggaran pendapatan dan belanja bisa dilihat secara sekilas bagaimana kondisi keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

#### **4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Utara**

Perbaikan anggaran sudah dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang berarti sudah memperbaiki kegagalan dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja dari daerah. Hal ini juga terlihat dari perbaikan anggaran belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 yang dikurangi sehingga SILPA yang dihasilkan juga menurun. Selanjutnya tidak ada perbedaan informasi yang dimiliki antara atasan dan bawahan sehingga penentuan sudah dilakukan dengan tepat dan memudahkan pencapaian anggaran dan proses fasilitasi Musrenbang juga dilakukan dalam bentuk bimbingan yang membantu pegawai dalam memahami proses fasilitasi tersebut. Proses perencanaan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak terpisah dari proses penganggarannya karena Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sekarang sudah melakukan proses dengan tahapan Renstra => Renja (e-Renja) => e-Kuangan yang



dilaksanakan untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan sistem elektronik dan juga dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah yang diketuai oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Penekanan anggaran dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan memprioritaskan anggaran tertentu sehingga anggaran yang telah disusun membuat pegawai akan berusaha memperoleh *variance* yang menguntungkan dengan merendahkan pendapatan dan meninggikan belanja. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara melakukan inovasi dalam penyusunan anggaran dengan melakukan studi banding di daerah lain sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan dalam penyusunan anggaran.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara melakukan komitmen mulai dari eselon 2 sampai eselon 4 untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan menandatangani kontrak kinerja yang merupakan penilaian atas kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain dan juga adanya pemberian wewenang dari atasan kepada bawahan

yang artinya pemberian wewenang dapat mempengaruhi keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sudah tinggi sehingga dapat mengurangi kesenjangan anggaran.

Atasan meminta pendapatan dari masing-masing bidang pada saat berkumpul dalam penyusunan anggaran dan atasan juga memberikan pendapat dan bertanggungjawab atas penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang artinya dinas memiliki partisipasi yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran sehingga dapat mengurangi kesenjangan anggaran.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa faktor yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah Penekanan anggaran yang dilakukan oleh dinas tersebut dengan memprioritaskan anggaran tertentu yang merupakan desakan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan anggaran tertentu yang telah dibuat. Penekanan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga dapat terlihat dari anggaran pendapatan daerah yang lebih rendah daripada anggaran belanjanya.

Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan et al (2016) yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran adalah asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasional sedangkan secara teoritis faktor yang

menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran adalah partisipasi anggaran yang tinggi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan pada bab terdahulu antara lain:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan bahwa selisih-selisih yang terjadi disebabkan oleh anggaran belanja daerah yang lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah, karena anggaran yang sifatnya hanya berupa taksiran dan estimasi terlihat kesenjangan anggaran dan ketidakseimbangan anggaran menimbulkan ketidakefektifan dan efisiensi dalam penyusunan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tetapi anggaran pada dinas tersebut sudah digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan, hal ini terlihat dari perbaikan realisasi anggaran pendapatan yang terus menerus meningkat pada setiap tahunnya dan dengan perbaikan belanja daerah yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan cara menurunkan anggaran belanja pada tahun 2016 sehingga SILPA yang dihasilkan juga menurun dan juga dari evaluasi anggaran yang dilakukan dinas tersebut.
2. Faktor yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah dari penekanan anggaran yang dilakukan oleh dinas dengan memprioritaskan anggaran tertentu untuk segera dilaksanakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perbedaan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah harus diaawasi lebih ketat dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara harus melakukan analisis varian untuk mengetahui besarnya selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak harus memprioritaskan anggaran tertentu sehingga tidak terjadi penekanan anggaran yang mengakibatkan kesenjangan anggaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuty Widia (2014), *Akuntansi Managemen*, Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Darise Nurlan (2009), *Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Jakarta Barat: PT Indeks
- Fuadi Afif (2013), *Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran*. Skripsi, UNP Padang
- Grace Yunita Liando dan Inggriani Elim (2016), *Analisa Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Handoko T. Hani (2003), *Managemen*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Hafsah et al (2015), *Akuntansi keuangan Menengah 1*, Medan: Perdana Publishing
- Julita et al (2014), *Penganggaran Perusahaan*, Bandung: Citapustaka Media
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2012), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat
- Marchelino Daling (2013), *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Nordiawan, D et al. (2009), *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat
- Untari Rusita (2014), *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang*. Skripsi, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang
- Pamungkas Bambang (2012), *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Ranggagading, Bogor
- Rambe, et al (2015), *Managemen Keuangan*, Bandung: Citapustaka Media
- Verimon Simson, et al (2007), *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Skripsi. Unhas, Makassar

Irfan Muhammad, et al (2016), *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Jurnal Akuntansi dan Investasi. NTB

### Daftar Riwayat Hidup

Nama : Hijrah Nopriyanti Simamora

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/ 22 November 1996

Warga Negara : Indonesia

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat : Jalan Jamin Ginting gang Golf No. 4B

Nomor Handphone : 0852-0694-4144

Email : hijrah.nopriyanti@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 200119 Batang Ayumi Julu Padangsidempuan (2002-2008)
2. SMP Negeri 1 Padangsidempuan (2008-2011)
3. SMA Negeri 4 Padangsidempuan (2011-2014)
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2014-Sekarang)



PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Kepada Yth,  
Kantor Jurusan  
Fakultas Ekonomi UMSU  
Di  
Medan

Medan, ..... 2018

**PERNYATAAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hijrah Nopriyanti Simamora

Npm : 1405170303

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data yang ada pada skripsi ini adalah benar saya peroleh langsung dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Utara. Dan apabila di kemudian hari data-data pada skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Saya Yang menyatakan



Hijrah Nopriyanti Simamora

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan  
Fakultas Ekonomi UMSU  
Di  
Medan

Medan..... H  
M

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIDRAH NOPRIYANTI SINAMORA  
NPM : 1405170303  
Konsentrasi : KEUANGAN  
Kelas/Semester : VII - E AKUMTANSY PAB1

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage Operasional terhadap perataan laba di Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
2. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Dra. Fatmawarni, MM

Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

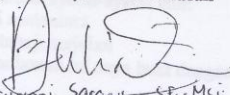
1. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah mengalami fluktuasi
2. Adanya kesenjangan dan ketidakimbangan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahun yang tidak menguntungkan
3. Kurangnya pengawasan terhadap penyusunan anggaran

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:


Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Alat Pengawasan Untuk Menilai Kinerja Manajemen Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Nomor Agenda : 196

Ketua/ Sekretaris Jurusan

  
(Fitriani Saragih SE.Msi)

Pemohon

  
(Hidrah Nopriyanti smr)

Diketahui Oleh  
Pembimbing

(Dra. Fatmawarni, MM)

Catatan:

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

201

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : H I J R A H N O P R I Y A N T I S M R

NPM : 1 4 0 5 1 7 0 3 0 3

Tempat/Tgl. Lahir : P A D A N G S I D I M P U A N  
2 2 N O V E M B E R 1 9 9 6

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : J L D A M I N G I N T I H G N O  
6 9 6 0 L F N O A B

Tempat Penelitian : D I N A S E N E R G I D A N S U M B  
E R D A Y A M I N E R A L S U M A T  
E R A U T A R A

Alamat Penelitian : J L S E T I A B U D I P S K D  
T E 0 0 4 T A N D U N G S A R I M E  
D A H

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan  
identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Sekelompok saya lampirkan syarat-syarat lain:

• Transkrip nilai sementara

• Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:  
Ketua Jurusan / Sekretaris

( Zulia Hanum SE, Msi )

Wassalam  
Pemohon

( Hijrah Nopriyanti Smr )



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA  
N.P.M : 1405170303  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Proposal : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI ALAT PENGAWASAN UNTUK MENILAI KINERJA MANAGEMEN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
29/1-2018	Tambahan Temi pendukung dlm fatur belasan masalah batas masalah dan masalah diproses kemudian terdulu kepada konsepsi utama variabel Ditatar pustaka Buku pedoman gunan		
31/1-2018	Penulisan Analisis data Teknik Pengumpulan data		
7/2-2018	Hece selasai kmlbja		

Pembimbing Proposal

Dra. FATMAWARNI, MM

Medan, Januari 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

nama Lengkap : HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA  
 NPM : 1405170303  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
 Judul Proposal : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI ALAT PENGAWASAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
2/2-2018	Tambahan teori faktor 2 yg men mencabikan tdk tercapainya target anggar an. dim Bab III tda ada Angket: - pabiv & nupad skvrtika dep kumusan masalah		
7/3-2018	Bimbingan Umum diperjelas Hcl pembelian anggaran & redaksi di uraikan per tahun. Faktor 2 yg mem pnc amh+ agar uraikan faktor defans nst wahan panca sara		
1/3-2018	Pembahasan mpa belum ada		
4/3-2018	Acc selesai Bimbingan		

Pembimbing Skripsi

Dra. FATMAWARNI, M.M

Medan, Februari 2018  
 Diketahui/Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Terpercaya

Surat ini agar disebutkan  
nomor

nomor : M1 /II.3-AU/UMSU-05/ C / 2018

Medan, 12 jumadil Awal 1439 H

lampiran

:

29 Januari

2018M

perihal

: IZIN RISET

Kepada

:

Yth. Bapak / Ibu Pimpinan

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUMUT

Jln. Setia Budi Psr II No. 84 Medan

Di.-

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA  
NPM : 1405170303  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan

H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
Jl. Setia Budi Psr. II No. 84 Tanjung Sari - Medan

Facsimile (061) 8214733

Telepon (061) 821 3533

Kode Pos - 20132

Medan, 29 Januari 2018

Nomor : 420/53/DESDM/2018  
Tgl :  
Aspirasi :  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

**KepadaYth,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**di-**  
**Medan**

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor 142/IL.3-AU/UMSU-05/C/2017 tanggal 13 Desember 2017, perihal : Permohonan Izin Riset, maka pada prinsipnya kami **tidak keberatan dan menerima** mahasiswa/i Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang namanya tersebut dibawah ini :

N P M : 1405170303

N a m a : HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA

Jurusan : AKUTANSI

Topik : "Analisis Penerapan PSAP Terhadap Laporan Keuangan Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara".

Untuk melaksanakan Riset pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Mahasiswa/i yang namanya tersebut diatas dalam melaksanakan Riset harus mentaati segala peraturan yang berlaku pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Pt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA



IF. ZUBADI, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19630822 199003 1 004



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238**

*BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI*

Pada hari ini **SENIN, 19 Februari 2018** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi dengan agenda sebagai berikut :

**N a m a** : HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA  
**N . P . M .** : 1405170303  
**Tempat / Tgl.Lahir** : PADANGSIDEMPUAN,22 NOVEMBER 1996  
**Alamat Rumah** : JL.JAMIN GINTING GG.GOLF  
**JudulProposal** : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI ALAT PENGAWASAN UNTUK MENILAI KINERJA MANAGEMEN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
	judul disesuaikan
	identifikasi masalah - rumusan masalah diperbaiki - tujuan penelitian
	kerangka konseptual bergeser
	Definisi operasional - populasi dan sampel - waktu penelitian - teknik analisis data
Penyimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 19 Februari 2018

**TIM SEMINAR**

**Ketua**

**FITRIANI SARAGIH,SE,M.Si**

**Pembimbing**

**DRA.FATMAWARNI,MM**

**Sekretaris**

**ZULIA HANUM,SE,M.Si**

**Pembanding**

**HENNY ZURIKA LBS,SE,M.Si**





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari SENIN, 19 Februari 2018 menerangkan bahwa:

Nama : HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA  
N.P.M. : 1405170303  
Tempat / Tgl.Lahir : PADANGSIDEMPUAN, 22 NOVEMBER 1996  
Alamat Rumah : JL.JAMIN GINTING GG.GOLF

Judul Proposal : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
SEBAGAI ALAT PENGAWASAN UNTUK MENILAI KINERJA  
MANAGEMEN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Fatmawarni, MM 24/2/2018*

Medan, 19 Februari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembimbing

DRA.FATMAWARNI, MM

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
Dekan

*22/2/18*

H.JANURI, SE, MM. M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Agung, Cerdas & Terpercaya*  
Menjawab surat ini agar disebutkan  
dan tanggalnya

Nomor : 012-III.3-AU/UMSU-05/F/2018  
Lamp. : -  
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 06 Djum Akhir 1439 H  
22 Februari 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. SUMUT**  
di  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA  
N P M : 1405170303  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI ALAT PENGAWASAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan ✓

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.



Universitas Terpercaya

Surat ini agar disebutkan  
pembuatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR : 013 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal **19 FEBRUARI 2018**  
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :


Nama : HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA  
N P M : 1405170303  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
SEBAGAI ALAT PENGAWASAN UNTUK MENILAI KINERJA  
KEUANGAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
Pembimbing : **Dra. FARMAWARNI, MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan ” **BATAL** ” bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **22 FEBRUARI 2019**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : MEDAN  
Pada Tanggal : 06 Djum Akhir 1439 H  
22 Februari 2018 M

Dekan ✓  
  
H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
 Jl. Setia Budi Psr. II No. 84 Tanjung Sari - Medan

Facsimile (061) 8214733

Telepon (061) 821 3533

Kode Pos - 20132

Medan, 12 Maret 2018

nomor : 420 / 745 / DESDM/2018  
 at :  
 ppiran :  
 rihal : Telah Menyelesaikan Riset  
 Pada Dinas ESDM Provsu

KepadaYth,  
 Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 di-  
 M e d a n

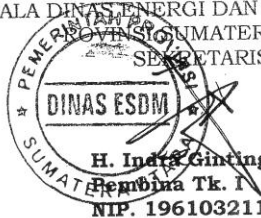
Berdasarkan surat dari Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 420/54/DESDM/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal : Permohonan Izin Riset. Tindak lanjut dari surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Nomor : 812/11.3-AU/UMSU-05/F/2017 tanggal 13 Desember 2017. Maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara menyatakan mahasiswa/i yang namanya tersebut dibawah ini :

No.	N A M A	NPM	PROGRAM STUDI
1.	HIJRAH NOPRIYANTI SIMAMORA	1405170303	AKUTANSI

Telah melaksanakan/menyelesaikan Riset pada Dinas Energi dan Sumber Daya Minera Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

An. Plt KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 PROVINSI SUMATERA UTARA  
 SEKRETARIS

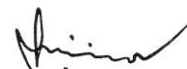
  
**H. Indra Ginting, SH**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196103211986021002

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**SKPD : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013**

1-1

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2013	Persen (%)	Realisasi 2012
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
Hasil Retribusi Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
JUMLAH	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
BELANJA DAERAH	16.652.628.904,00	13.727.647.080,00	82,44	-
BELANJA OPERASI	15.403.888.904,00	12.479.937.080,00	81,02	-
1. Belanja Pegawai	11.669.698.254,00	8.796.039.930,00	75,38	-
2. Belanja Barang dan Jasa	3.734.190.650,00	3.683.897.150,00	98,65	-
BELANJA MODAL	1.248.740.000,00	1.247.710.000,00	99,92	-
Peralatan dan mesin	51.250.000,00	50.550.000,00	98,63	-
Gedung dan Bangunan	66.000.000,00	65.670.000,00	99,50	-
Jalan, irigasi dan jaringan	1.131.490.000,00	1.131.490.000,00	100,00	-
JUMLAH	16.652.628.904,00	13.727.647.080,00	82,44	-
SURPLUS/(DEFISIT)	(16.648.628.904,00)	(13.723.647.080,00)	82,43	-

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN  
ENERGI



Dr. Ir. Binsar Situmorang, M.Si, MAF  
Nip. 19630602 199003 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
SKPD : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

1-4

Nomor Unut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	-	
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	-	
4.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	
	<b>BELANJA</b>	<b>23.949.155.220,00</b>	<b>21.877.041.294,00</b>	<b>2.072.113.926,00</b>	-	
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9.538.327.000,00</b>	<b>8.384.762.444,00</b>	<b>1.153.564.556,00</b>	-	
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.538.327.000,00	8.384.762.444,00	1.153.564.556,00	-	
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.006.327.000,00	5.889.824.944,00	1.116.502.056,00	-	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.210.233.200,00	4.467.032.140,00	743.201.060,00	-	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	544.369.800,00	454.249.318,00	90.120.482,00	-	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	250.083.000,00	231.610.000,00	18.473.000,00	-	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	100.147.700,00	64.350.000,00	35.797.700,00	-	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	267.088.900,00	194.140.000,00	72.948.900,00	-	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	386.875.800,00	269.200.000,00	127.675.800,00	-	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	95.706.700,00	87.004.066,00	8.702.634,00	-	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	122.900,00	81.382,00	41.518,00	-	
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	151.699.000,00	132.158.038,00	19.540.962,00	-	
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.532.000.000,00	2.494.937.500,00	37.062.500,00	-	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.532.000.000,00	2.494.937.500,00	37.062.500,00	-	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14.410.828.220,00</b>	<b>13.492.278.850,00</b>	<b>918.549.370,00</b>	-	
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	957.930.000,00	849.915.000,00	108.015.000,00	-	
5.2.1.01.	Honorarium PNS	911.090.000,00	835.150.000,00	75.940.000,00	-	
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemertika Daerah	10.400.000,00	7.860.000,00	2.520.000,00	-	
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	129.210.000,00	129.210.000,00	-	-	
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6.120.000,00	6.120.000,00	-	-	
5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	21.140.000,00	21.140.000,00	-	-	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	664.350.000,00	631.850.000,00	32.500.000,00	-	
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengabdian Masyarakat dan Jasa	82.870.000,00	41.950.000,00	40.920.000,00	-	
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.500.000,00	-	30.500.000,00	-	
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Non PNS	28.000.000,00	-	28.000.000,00	-	
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorier/tidak tetap	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
5.2.1.03.	Uang Lembur	16.340.000,00	14.765.000,00	1.575.000,00	-	
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	16.340.000,00	14.765.000,00	1.575.000,00	-	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.306.518.400,00	10.701.858.850,00	604.659.550,00	-	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	248.554.800,00	230.688.950,00	17.865.850,00	-	
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	77.714.800,00	76.838.450,00	876.350,00	-	
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/Administrasi tender	930.000,00	-	930.000,00	-	
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	30.000.000,00	29.955.400,00	44.600,00	-	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	14.400.000,00	14.400.000,00	✓	-	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	125.510.000,00	109.495.100,00	✓	16.014.900,00	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	356.870.000,00	342.996.000,00	✓	13.874.000,00	-
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	7.250.000,00	7.240.000,00	✓	10.000,00	-
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	79.620.000,00	66.656.000,00	✓	12.964.000,00	-
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	255.000.000,00	254.100.000,00	✓	900.000,00	-
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia dan Pupuk	15.000.000,00	15.000.000,00	✓	-	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	898.925.000,00	895.394.800,00	✓	43.530.200,00	-
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	✓ 85.300.000,00	✓ 84.748.000,00	✓	552.000,00	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Kebersihan	✓ 90.000.000,00	✓ 189.600.000,00	✓	400.000,00	-
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	✓ 180.000.000,00	✓ 179.820.000,00	✓	180.000,00	-
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	13.200.000,00	9.514.900,00	✓	3.685.100,00	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	22.800.000,00	9.847.300,00	✓	12.952.700,00	-
5.2.2.04.08.	Belanja listrik	114.600.000,00	112.161.400,00	✓	1.838.600,00	-
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	9.250.000,00	-	✓	9.250.000,00	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	✓ 20.000.000,00	✓ 17.644.500,00	✓	2.355.500,00	-
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/intranet/TV Kabel/TV Satelit	✓ 23.400.000,00	✓ 22.005.550,00	✓	1.394.450,00	-
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	✓ 8.500.000,00	✓	✓	8.500.000,00	-
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	✓ 32.475.000,00	✓ 30.053.150,00	✓	2.421.850,00	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.460.000,00	21.238.150,00	✓	13.251.850,00	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	✓ 8.820.000,00	✓ 2.602.000,00	✓	6.218.000,00	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.420.000,00	14.418.350,00	✓	3.650,00	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	✓ 11.250.000,00	✓ 4.219.800,00	✓	7.030.200,00	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.379.600,00	120.931.900,00	✓	16.447.700,00	-
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	✓ 98.222.400,00	✓ 86.671.000,00	✓	11.651.400,00	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	✓ 39.157.200,00	✓ 34.360.900,00	✓	4.796.300,00	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.100.000,00	8.030.000,00	✓	70.000,00	-
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	✓ 8.100.000,00	✓ 8.030.000,00	✓	70.000,00	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	4.785.000,00	✓	715.000,00	-
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	✓ 5.500.000,00	✓ 4.785.000,00	✓	715.000,00	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	118.352.000,00	109.243.000,00	✓	7.109.000,00	-
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	✓ 22.632.000,00	✓ 22.594.000,00	✓	38.000,00	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	✓ 79.220.000,00	✓ 72.187.000,00	✓	7.033.000,00	-
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	✓ 14.500.000,00	✓ 14.462.000,00	✓	38.000,00	-
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	58.250.000,00	55.875.000,00	✓	375.000,00	-
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	✓ 58.250.000,00	✓ 55.875.000,00	✓	375.000,00	-
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	81.250.000,00	80.850.000,00	✓	400.000,00	-
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	✓ 81.250.000,00	✓ 80.850.000,00	✓	400.000,00	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.859.693.000,00	3.474.290.550,00	✓	385.402.450,00	-
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	✓ 2.603.665.000,00	✓ 2.525.060.000,00	✓	78.605.000,00	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	✓ 1.116.200.000,00	✓ 949.230.550,00	✓	166.969.450,00	-
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	✓ 139.828.000,00	✓	✓	139.828.000,00	-
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	✓ 42.554.000,00	✓ 35.354.000,00	✓	7.200.000,00	-
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	42.554.000,00	35.354.000,00	✓	7.200.000,00	-
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	✓ 76.000.000,00	✓ 75.713.500,00	✓	286.500,00	-
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	✓ 76.000.000,00	✓ 75.713.500,00	✓	286.500,00	-
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	507.600.000,00	501.371.000,00	✓	6.229.000,00	-

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	✓ 17.600.000,00	✓ 14.000.000,00	✓ 3.600.000,00	-	-
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi/Pejabat Ahli	✓ 480.000.000,00	✓ 487.371.000,00	✓ 2.628.000,00	-	-
5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga	✓ 5.077.000.000,00	✓ 4.985.097.000,00	✓ 91.903.000,00	-	-
5.2.2.23.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	✓ 2.800.000.000,00	✓ 2.723.102.000,00	✓ 76.898.000,00	-	-
5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat pada SKPD.	✓ 2.277.000.000,00	✓ 2.261.995.000,00	✓ 15.005.000,00	-	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	2.146.379.820,00	1.940.505.000,00	205.874.820,00	-	-
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	✓ 130.000.000,00	✓ 128.500.000,00	✓ 1.500.000,00	-	-
5.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemboran Air Tanah	✓ 130.000.000,00	✓ 128.500.000,00	✓ 1.500.000,00	-	-
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	✓ 1.450.000.000,00	✓ 1.251.000.000,00	✓ 199.000.000,00	-	-
5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	✓ 1.450.000.000,00	✓ 1.251.000.000,00	✓ 199.000.000,00	-	-
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	✓ 103.000.000,00	✓ 102.496.000,00	✓ 502.000,00	-	-
5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	✓ 32.500.000,00	✓ 32.340.000,00	✓ 160.000,00	-	-
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	✓ 24.000.000,00	✓ 23.958.000,00	✓ 42.000,00	-	-
5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	✓ 46.500.000,00	✓ 46.200.000,00	✓ 300.000,00	-	-
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	✓ 35.100.000,00	✓ 34.903.000,00	✓ 197.000,00	-	-
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	✓ 30.600.000,00	✓ 30.448.000,00	✓ 152.000,00	-	-
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filing kabinet	✓ 4.500.000,00	✓ 4.455.000,00	✓ 45.000,00	-	-
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	✓ 92.078.820,00	✓ 89.738.000,00	✓ 2.341.820,00	-	-
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	✓ 40.500.000,00	✓ 40.392.000,00	✓ 108.000,00	-	-
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	✓ 19.000.000,00	✓ 18.898.000,00	✓ 102.000,00	-	-
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	✓ 21.578.820,00	✓ 20.658.000,00	✓ 921.820,00	-	-
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	✓ 11.000.000,00	✓ 9.790.000,00	✓ 1.210.000,00	-	-
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	✓ 14.500.000,00	✓ 14.377.000,00	✓ 123.000,00	-	-
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	✓ 14.500.000,00	✓ 14.377.000,00	✓ 123.000,00	-	-
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	✓ 5.000.000,00	✓ 4.950.000,00	✓ 50.000,00	-	-
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	✓ 5.000.000,00	✓ 4.950.000,00	✓ 50.000,00	-	-
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	✓ 73.500.000,00	✓ 73.000.000,00	✓ 500.000,00	-	-
5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Karpas	✓ 73.500.000,00	✓ 73.000.000,00	✓ 500.000,00	-	-
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	✓ 2.100.000,00	✓ 2.090.000,00	✓ 10.000,00	-	-
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	✓ 2.100.000,00	✓ 2.090.000,00	✓ 10.000,00	-	-
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	✓ 185.000.000,00	✓ 184.552.000,00	✓ 448.000,00	-	-
5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	✓ 185.000.000,00	✓ 184.552.000,00	✓ 448.000,00	-	-
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	✓ 56.100.000,00	✓ 54.897.000,00	✓ 1.203.000,00	-	-
5.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	✓ 15.000.000,00	✓ 15.000.000,00	-	-	-
5.2.3.27.25.	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe	✓ 41.100.000,00	✓ 39.897.000,00	✓ 1.203.000,00	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.944.155.220,00</b>	<b>21.871.041.294,00</b>	<b>2.072.113.926,00</b>	-	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(23.944.155.220,00)</b>	<b>(21.871.041.294,00)</b>	<b>(2.071.113.926,00)</b>	-	-



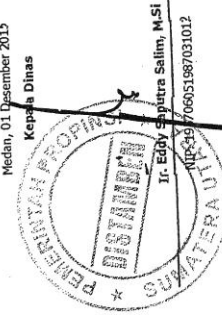
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

Unit Organisasi : 2  
 Organisasi : 2.03  
 Unit Organisasi : 2.03.01  
 Organisasi : 2.03.01.01  
 Unit Organisasi : 2.03.01.01

Urusan Pilihan  
 Energi dan Sumberdaya Mineral  
 Dinas Pertambangan dan Energi  
 Dinas Pertambangan dan Energi

		URUTAN			
		ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	(%)	REALISASI 2014
<b>URUT</b>					
<b>PENDAPATAN - LRA</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>					
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA					
1.2		27.048.475,000,00	25.321.876,403,00	93,62	21.877.041,294,00
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai					
1.1		26.329.775,000,00	24.611.549,403,00	93,47	19.836.536,294,00
1.1.1		9.372.860,000,00	8.711.807,933,00	93,05	8.399.527,444,00
1.1.2		16.956.915,000,00	15.889.741,470,00	93,71	11.537.008,850,00
Belanja Barang dan Jasa					
1.2		718.400,000,00	710.327,000,00	98,88	1.940.505,000,00
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Modal Perawatan dan Mesin					
2.2		703.400,000,00	695.387,000,00	98,86	1.885.608,000,00
2.5		15.000,000,00	14.940,000,00	99,60	54.887,000,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>					
		(27.011.775,000,00)	(25.252.476,403,00)	93,49	(21.871.041,294,00)
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLIPA)</b>					
		(27.011.775,000,00)	(25.252.476,403,00)	93,49	(21.871.041,294,00)

Medan, 01 Desember 2015  
 Kepala Dinas





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Urusan Pemerintahan : 2  
Bidang Pemerintahan : 2.03  
Unit Organisasi : 2.03.01  
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01

Urusan Pilihan  
Energi dan Sumbanda Mineral  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NO. URUT	URAIAN	URAIAN		
		ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	REALISASI 2015
1	PENDAPATAN	120.000.000,00	139.000.000,00	69.400.000,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	120.000.000,00	139.000.000,00	69.400.000,00
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	120.000.000,00	139.000.000,00	69.400.000,00
2	BELANJA	24.508.016.150,00	23.035.994.738,00	25.321.876.403,00
2.1	BELANJA OPERASI	24.032.201.150,00	22.570.951.738,00	24.611.549.403,00
2.1.1	Belanja Pegawai	11.018.437.000,00	9.715.506.138,00	9.799.467.933,00
2.1.1.1	Belanja Barang	13.013.764.150,00	12.855.445.600,00	14.812.081.470,00
2.1.1.2		475.815.000,00	465.043.000,00	710.327.000,00
2.2	BELANJA MODAL	450.815.000,00	440.490.000,00	695.387.000,00
2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.553.000,00	14.940.000,00
2.2.2	Belanja Aset Tetap Lainnya	(24.388.016.150,00)	(22.896.994.738,00)	(25.252.476.403,00)
2.2.5		(24.388.016.150,00)	(22.896.994.738,00)	(25.252.476.403,00)

SURPLUS / (DEFISIT)

SISA, LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)

Medan, 11 Januari 2016  
Kepala Dinas

Ir. Eddy Saputra Salim, M.Si

NIP. 95706051987031012

**Hasil wawancara  
Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara**

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Masihkah upaya kualitas perbaikan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara bernilai strategis?	Kualitas perbaikan anggaran sudah dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
2.	Apakah ada perbedaan informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara?	Tidak ada perbedaan informasi yang dimiliki antara atasan dan bawahan.
3.	Apakah proses fasilitasi Musrenbang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara diberikan dalam bentuk bimbingan?	Ya, proses fasilitasi Musrenbang diberikan dalam bentuk bimbingan.
4.	Apakah proses perencanaan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara terpisah dari penganggaran?	Proses perencanaan kegiatan dilakukan secara bersamaan dengan proses penganggaran dan dilakukan dengan tahapan Renstra => Renja (e- Renja) => e- Keuangan.
5.	Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dievaluasi oleh pemerintah provinsi?	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dievaluasi oleh TAPD.
6.	Apakah ada penekanan anggaran yang dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara?	Penekanan anggaran dilakukan dengan memprioritaskan anggaran tertentu.
7.	Apakah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara cenderung melonggarkan anggaran dalam penyusunan anggaran?	Tidak ada pelonggaran anggaran dalam dinas karena semua tahapan sudah memakai sistem e.
8.	Apakah target anggaran yang terlalu sulit dicapai mempengaruhi atasan dalam mengambil tindakan jangka pendek yang mudah dicapai?	Tidak karena target anggaran selalu tercapai.
9.	Apakah ada inovasi yang dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada saat penyusunan anggaran?	Ada dengan melihat perkembangan dan melakukan studi banding di daerah lain dan juga melihat peraturan baru dan tata cara baru dengan menganggarkan kembali dengan sistem yang lebih canggih.
10.	Apakah ada komitmen pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera	Pasti ada komitmen kita namanya perjanjian kontrak

	Utara untuk mencapai target yang telah ditetapkan?	kinerja semua eselon menekan kontrak kinerja mulai dari eselon 2 sampai dengan eselon 4.
11.	Bagaimana komitmen pegawai dalam pelaksanaan proses penganggaran?	Semua pegawai melakukan laporan kinerja.
12.	Apakah perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain?	Pasti harus terpadu, konsisten dan sinkron perencanaan dan penganggarnya karena sudah memakai e Renja kecuali ada hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang.
13.	Apakah ada pemberian wewenang dari atasan kepada bawahan untuk bertanggungjawab untuk melakukan tugas dan keputusan?	Pasti ada pemberian wewenang dari atasan kepada bawahan.
14.	Apakah atasan meminta pendapat pada saat penyusunan anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara?	Pasti ada pendapat diambil dari setiap bidang karena dalam penyusunan anggaran dari semua bidang kumpul.
15.	Bagaimana kontribusi atasan dalam penyusunan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara?	Atasan memberikan pendapat dan bertanggungjawab dalam penyusunan anggaran.

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara